

LOGIN REGISTER

HOME BERITA ENSIKLO ORGANISASI AGENDA LIST CALEG GALLERY DOWNLOAD CONTACT US

RC Menyesatkan » Bawaslu temukan surat suara tanpa tandatangan KPPS di 9.187 TPS » Banyak warga Medan tak dapat C6 » Suara Perol

## KHITTHAH DAN PROGRAM PERJUANGAN

Posted by: Admin Tanggal Posting : 16 Juli 2013 Kategori : | Dibaca : 3137

### PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

#### I. MUKADDIMAH

*Khiththah* dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan garis-garis besar perjuangan Partai yang mencakup ideologi, latar belakang sejarah, hakikat dan kaidah perjuangan, jati diri Partai, cita-cita politik dan visi perjuangan, serta program strategis partai secara garis besar untuk mewujudkan tujuan dan usaha partai sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, dalam rangka berperan aktif mewujudkan tujuan nasional seperti yang disebutkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

*Khiththah* dan Program Perjuangan PPP ini disusun setelah mencermati perubahan lingkungan strategis dan kondisi objektif partai, yang merupakan cerminan reorientasi, redefinisi, dan reposisi partai dalam rangka peningkatan, penyempurnaan, dan pembaharuan dari *Khiththah* dan Program Perjuangan PPP sebelumnya.

*Khiththah* dan Program Perjuangan PPP ini juga diharapkan menjadi pedoman dan memberikan arah yang mengikat bagi seluruh anggota dan struktur partai dari atas sampai ke bawah dalam melaksanakan usaha dan kegiatan Partai. Secara internal, sasarannya diarahkan pada upaya pematapan PPP sebagai partai politik yang demokratis, sehat, bersatu, mandiri, berkualitas, memiliki kemampuan daya saing untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan politik nasional, sehingga akan meningkatkan perannya sebagai kekuatan sosial politik dalam pembangunan nasional dan pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Sedangkan sasaran eksternalnya adalah semakin memantapkan peran strategis partai dalam menyukseskan pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam panduan moral Islam. Kemampuan partai dalam menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi prioritas utama, sekaligus menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkeadilan dan UUD 1945.



JANGAN

Islam sebagai syari'at terakhir yang diturunkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada umat manusia adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal bagi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa. Islam sebagai agama (*ad-dien*) yang membawa kebenaran absolut karena ajarannya diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada umat manusia, bertujuan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna di antara ciptaan-Nya. Islam merupakan sekumpulan perintah dan larangan (*syariat*) yang mengandung tuntunan untuk menegakkan kebenaran, menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk sekalian alam semesta (*rahmatan lil*

### Jadwal Sholat

Jumat, 11 Apr 2014 08:33:35

Kota Jakarta

Subuh	Dhuhur	Ashar	Maghrib	Isya
04:38	11:56	15:14	17:56	19:06

### Facebook

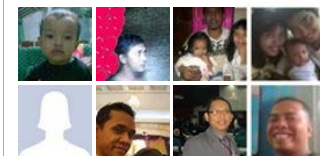
Find us on Facebook



Page Resmi DPP Partai Persatuan Pembangunan

Like

2,894 people like Page Resmi DPP Partai Persatuan Pembangunan.



Facebook social plugin

### Twitter

Tweets

 DPP PPP  
@DPP\_PPP

PPP News : Sekjen PPP: H. Romahurmuzyi, MT  
Menyesatkan [ppp.or.id/news](http://ppp.or.id/news)  
#BerkahPPP

 DPP PPP  
@DPP\_PPP

PPP News : PPP Belum Ber...  
[ppp.or.id/news/ppp-belum...](http://ppp.or.id/news/ppp-belum...)  
Expand

Tweet to @DPP\_PPP



Keyakinan terhadap universalitas Islam menuntut keharusan untuk meyakini adanya satu-satunya kebenaran yang mutlak dalam ajaran Islam dan pengakuan terhadap kemampuan ajaran Islam untuk diterapkan oleh siapa pun dan dimana pun serta dalam segala situasi dan kondisi yang bagaimana pun.

Keyakinan terhadap universalitas Islam harus disikapi dengan menjadikan nilai ajaran Islam sebagai tolok ukur dan pembuat kriteria untuk menilai segala sesuatu.

Keyakinan terhadap universalitas Islam juga menuntut keharusan untuk menerapkan nilai ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan serta menolak segala sesuatu yang diyakini bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

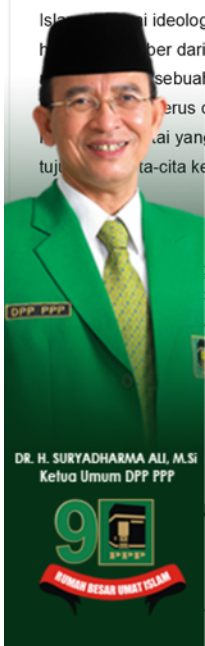
PPP menyadari bahwa kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan *wasilah* bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (*ukhuwah*), tolong menolong (*ta'awun*), dan toleransi (*tasamuh*).

PPP menyadari, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan suatu yang wajar, sebagai konsekuensi dari pranata *ijtihad* yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Untuk hal tersebut sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat orang lain dan menolak dialog, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (*tasamuh*). Sikap itu juga merupakan egoisme (*ananiyyah*) dan fanatisme kelompok (*ananiyyah hizbiyyah*) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (*al-'adawah*), pertentangan (*al-tanazu'*), dan perpecahan (*al-insyiqaaq*).

PPP memandang bahwa paham keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah paham keagamaan *ahlussunnah wal jama'ah* dalam arti luas. Yaitu suatu paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta *salaf as-sholeh*. Paham keagamaan Islam *ahlus sunnah wal jama'ah* adalah paham keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), menjaga keseimbangan (*tawazun*), dan menebarkan nilai-nilai kasih sayang untuk semesta alam (*rahmatan lil 'alamiin*). Paham keagamaan *ahlussunnah wal jama'ah* menolak segala bentuk sikap dan pandangan yang ekstrim (*tatharruf*), anarkisme, radikalisme dan budaya kekerasan lainnya.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran, sikap dan kebijakan Partai dan kader-kadernya harus berpedoman dari ajaran Islam. Ideologi adalah sekumpulan nilai yang dihubungkan secara sistemik yang melahirkan beberapa tindakan. Ideologi adalah penuntun, pedoman dan arah untuk mencapai tujuan politik. Perlu dilakukan penanaman dan internalisasi nilai-nilai ideologi kepada semua kader dan anggota Partai yang hakikatnya merupakan aparat ideologi partai (*ideological party apparatus*) untuk mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP.

yang dimaksudkan bahwa internalisasi nilai-nilai ideologi harus menjadi warna, corak, dan karakter Partai, yang melambungkan keluhuran dari ajaran Islam. PPP harus menyadari bahwa internalisasi nilai-nilai ideologi membawa ideologi Islam memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengamalkan dan *marwah* agama Islam.



DR. H. SURYADHARMA ALL, M.Si  
Ketua Umum DPP PPP

ANGGAN PPP

hasil fusi politik Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai

Search here ...

SEARCH

Populer

Terbaru

Komentar

Tag



KEUTAMAAN MEMPERINGATI  
MAULID NABI MUHAMMAD SAW  
27 Desember 2013



KEUTAMAAN MEMPERINGATI  
MAULID NABI MUHAMMAD SAW  
13 Januari 2014

Makna dan Hikmah Maulid Nabi  
Muhammad SAW  
13 Januari 2014

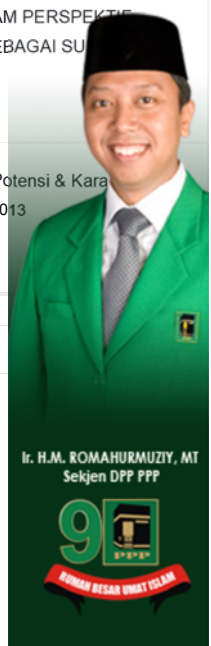


MEMBANGUN PARTAI  
PERSATUAN PEMBANGUNAN  
(PPP) DALAM PERSPEKTIF  
AKHLAK SEBAGAI SU  
KEIKHLASAN KEPAD  
30 September 2013



Mengenali Potensi & Karakteristik  
20 Agustus 2013

Video



Ir. H.M. ROMAHRUMUZYI, MT  
Sekjen DPP PPP



Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan 30 Dzulqad'ah 1392 Hijriyah merupakan partai politik penerus estafeta empat partai Islam dan wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggungjawab tokoh-tokoh umat Islam dan Pimpinan Partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melalui perjuangan politik.

PPP yang berasaskan Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniyah dan jasmaniah yang diridlai Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tekad dan kesadaran tersebut disampaikan melalui suatu deklarasi yang berbunyi sebagai berikut (disalin sesuai aslinya):

**DEKLARASI**  
**HASIL RAPAT PRESIDIUM**  
**BADAN PEKERJA DAN**  
**PIMPINAN FRAKSI KELOMPOK**  
**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Keempat Partai Islam: NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah seia sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spirituil /materil.

Untuk merealisasi kesepakatan ini telah dibentuk team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, baik organisatoris maupun politis.

Kelompok ini akan melaporkan hasil dari pekerjaan team dilaporkan Presidium untuk selanjutnya disampaikan kepada dan disahkan sebagai perwakilan yang lebih representatif yang Insya Allah akan diadakan selambat-lambatnya awal

Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiq dan Hidayah-Nya. Amin.

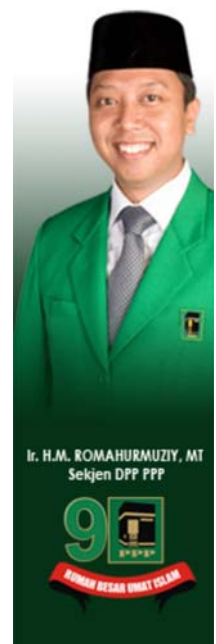
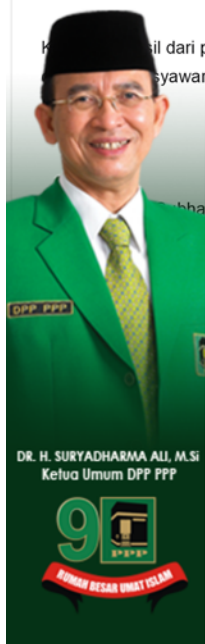
Jakarta, 5 Januari 1973

PRESIDIUM KELOMPOK

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Ttd,

KH. Dr. Idham Khalid



### Poling

Apakah Anda Setuju Jika PPP mencalonkan Kader Internal pada Pilpres 2014 ?

- SETUJU  
 TIDAK SETUJU

[PILIH](#) [LIHAT](#)

HMS. Mintaredja

H. Anwar Tjokroaminoto

Rusli Halil

KH. Masykur

Untuk mewujudkan tekad dan cita-cita tersebut, PPP dalam perjuangannya senantiasa berpegang pada *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP sebagai pedoman bagi pimpinan dan kader Partai dalam menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat dan mewujudkan cita-cita bangsa, seraya tetap memelihara akidah, menjalankan syariat dan mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan guna meneguhkan Islam yang *rahmatan lil'alam*.

*Khitthah* dan Program Perjuangan Partai merupakan dasar-dasar yang memuat haluan perjuangan Partai, cita-cita politik dan visi Partai yang harus diyakini dan dihayati oleh seluruh jajaran Partai dalam melaksanakan usaha dan kegiatan Partai. Setiap pimpinan, kader, aktivis, dan anggota partai berkewajiban mengamalkan *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP dalam menjalankan berbagai tugas antara lain: tugas Partai, tugas kenegaraan, tugas pemerintahan, maupun tugas kemasyarakatan dalam lingkup tujuan nasional.

Perjuangan PPP dalam upaya mencapai tujuan nasional tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah perjuangan bangsa. Sebagaimana telah diketahui bersama, sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah sejarah perjuangan dari satu bangsa yang tertindas yang berjuang melawan penjajahan dan penindasan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Bertahun-tahun lamanya bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan, memperjuangkan keadilan, membela kebenaran, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Perlawanan yang tak kenal menyerah terhadap penjajahan dengan pengorbanan jiwa dan raga serta gugurnya para *syuhada'* telah memberikan bukti yang nyata, betapa tinggi semangat perjuangan Bangsa Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam.

Selain dengan perlawanan fisik, dalam perjuangan ini tumbuh pula gerakan-gerakan dengan menggunakan organisasi modern yang di dalam sejarah politik Indonesia dinamakan pergerakan kemerdekaan dengan tujuan membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan. Pergerakan berbentuk organisasi modern ini mulai tumbuh pada permulaan abad XX. Syarikat Dagang Islam (1905) yang kemudian menjadi Partai Syarikat Islam, Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), dan lain-lain adalah organisasi-organisasi gerakan yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh umat Islam dalam upaya memperjuangkan aspirasi umat pada masa penjajahan. Perlawanan yang dimulai secara sporadis, akhirnya terkoordinasi secara nasional dalam bentuk organisasi yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Berbagai macam motivasi telah menjadi penggerak semangat perjuangan tersebut. Tetapi motivasi yang paling mendalam adalah berjuang dengan harapan mendapatkan kemerdekaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Akhirnya, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka diproklamkanlah Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jum'at, 9 Ramadhan 1364 Hijriyah. Baik di dalam perjuangan menjelang Proklamasi kemerdekaan dan setelahnya, peranan partai-partai politik Islam cukup besar terutama dalam membangkitkan dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Bahkan partai-partai Islam tersebut bersama-sama berjuang dalam bentuk memberikan kontribusi dalam wacana politik yang dinamis seperti dalam MIAI (Majelis Islam Ahlul Sunnah dan Beragama) dan berbagai perdebatan di sidang-sidang Badan Konstituante.

Sejarah perjuangan bangsa dan mengisi kemerdekaan, partai-partai politik Islam yang hidup dan tumbuh di Indonesia, serta merupakan mata rantai yang penting di dalam menghimpun potensi dan pemusatan kekuatan masyarakat bermasyarakat dan bernegara adalah wahana yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab melaksanakan UUD 1945. Partai-partai politik Islam bersama-sama dengan partai-partai politik lain memperjuangkan demokrasi, kehidupan beragama, melaksanakan pendidikan politik, dan berperan berpolitik di kalangan rakyat.

Keberhasilan perjuangan dan cita-cita perjuangan PPP tidak lain adalah merupakan mata rantai yang menghubungkan perjuangan dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian dengan kepedulian dan tanggung jawab untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara serta berperan serta dalam pembangunan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, serta menyukseskan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada ridha Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.



Sejak berdirinya 5 Januari 1973, PPP terus berjuang untuk membawakan aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu semua adalah upaya PPP agar berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

PPP juga berada di garis depan dalam menghadang bulldoser rezim Orde Baru yang ingin melakukan depolitisasi mahasiswa dan kaum cerdik cendekiawan dan depolitisasi masyarakat sipil yang pada akhirnya membungkam demokrasi dan menyuburkan otoritarianisme. Sudah sejak lama PPP tidak kenal lelah memperjuangkan kehidupan politik yang lebih sehat dan demokratis, melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum yang jujur dan adil, yang akhirnya berhasil diterima dalam Era Reformasi, setelah sejak awal 1980-an diperjuangkan secara terus menerus. Pada era itu juga Begitu PPP selalu mendungungkan pembatasan masa jabatan Presiden tidak lebih dari dua periode agar sirkulasi kepemimpinan berjalan secara alamiah, demokratis, dan yang terpenting menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Pengembangan ekonomi kerakyatan, penegakan hukum dan keadilan, pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), otonomi daerah, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pemberantasan perjudian (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah/SDSB), penghapusan asas tunggal dan indoktrinasi melalui Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P4) adalah isu-isu penting yang merupakan penjabaran dari platform perjuangan PPP yang secara gigih terus disuarakan oleh kader-kader partai di berbagai forum resmi maupun tidak resmi. Saat ini dan ke depan, PPP akan terus merumuskan dan merevitalisasi program perjuangannya sesuai dengan kecenderungan perkembangan ke depan, tidak lain untuk kepentingan Indonesia yang maju, sejahtera, makmur dan berkeadilan dalam panduan moral, nilai dan ajaran Islam.

### C. JATI DIRI PPP

PPP adalah partai politik dengan jati diri Islam yang merupakan hasil fusi politik Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), sebagai penerus estafeta perjuangan politik umat Islam, berakhlakul karimah, berwawasan ke-Indonesia-an, berorientasi keumatan dalam mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan bathin yang diridloi Allah *Subhanahu Wata'ala (Baladun Thoyyibatun wa Robbun Ghafur)* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Rumusan jati diri PPP di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Historis, keberadaan PPP merupakan penerus estafeta perjuangan politik umat Islam di Indonesia. Sejak sebelum reformasi bergulir tahun 1998, PPP adalah wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam yang untuk membawakan aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari latar belakang kelahirannya, PPP yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 merupakan hasil fusi politik partai-partai Islam yang ada saat itu, sekaligus sebagai kelanjutan dari perjuangan politik Islam di Indonesia, yakni sejak lahirnya organisasi pergerakan Islam modern seperti Syarikat Dagang Islam (SDI) dan menjadi Partai Syarikat Islam, Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), MIAI (1930), dan lain-lain.

2. Identitas, PPP adalah partai Islam yang berorientasi keindonesiaan dan keumatan. Artinya, PPP adalah partai-partai sekuler yang tidak berasas Islam dan cenderung memisahkan secara diametral antara agama dan negara, serta menjauhkan peran-peran Islam dalam kehidupan kenegaraan. Sebagai partai Islam, PPP menegaskan perbedaan dirinya dengan partai-partai Islam lain yang berpaham fundamentalis dengan menonjolkan simbol dan agenda universal Islam di atas kepentingan bangsa dan negara. 3. Nilai, PPP mencerminkan corak "Islamnya orang Indonesia" atau "Islam keindonesiaan", yang mengedepankan nilai-nilai harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan. Dalam hal ini, hubungan antara agama dan negara bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara. Ini sesuai dengan tujuan perjuangan bagi terwujudnya negara Indonesia yang damai, makmur, sejahtera serta religius. 4. Program, PPP berpegang pada pemahaman Islam yang inklusif, moderat, santun, dan anti redikalisme, sebagai penjabaran dari Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*.



3. Orintasi perjuangan politik PPP adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlakul karimah, serta bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, menjunjung tinggi nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang diridai Allah *Subhanahu Wata'ala (Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur)* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini, PPP berkehendak kuat untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan kenegaraan yang demokratis dan tegaknya supremasi hukum. Pada saat yang bersamaan, PPP bertekad menjadikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai landasan dan sumber inspiratif dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### D. VISI PPP

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah "Terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman".

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; 1) perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip *amar makruf nahi munkar*; 2) pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; 3) pradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan 4) komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya *good and clean government*, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan masyarakat yang berkeadilan, disiplin berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, serta terciptanya suasana tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta peningkatan kualitas penegak hukum.

PPP berkomitmen untuk terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, disiplin dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya hak-hak sipil, mencegah segala upaya marginalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama, serta membangun nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran Islam dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran Islam dan nilai-nilai agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya kehidupan masyarakat yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen untuk terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, sehat dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya hak-hak sipil, mencegah segala upaya marginalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama, serta membangun nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran Islam dan nilai-nilai agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya kehidupan masyarakat yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen untuk terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, sehat dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya hak-hak sipil, mencegah segala upaya marginalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama, serta membangun nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran Islam dan nilai-nilai agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya kehidupan masyarakat yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen untuk terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, sehat dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya hak-hak sipil, mencegah segala upaya marginalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama, serta membangun nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran Islam dan nilai-nilai agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya kehidupan masyarakat yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen untuk terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, sehat dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya hak-hak sipil, mencegah segala upaya marginalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama, serta membangun nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran Islam dan nilai-nilai agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya kehidupan masyarakat yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.



Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.

#### E. MISI PPP (KHIDMAT PERJUANGAN)

1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, liberalisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia;
2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan;
3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika;
4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat;
5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, *baladun thoyyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

#### F. PRINSIP PERJUANGAN

**1. Beribadah:** PPP senantiasa berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip ibadah, dalam arti utamanya yaitu untuk mencapai keridaan Allah *Subhanahu Wata'ala*. Oleh karena itu, seluruh kegiatan partai adalah merupakan keterpanggilan untuk beribadah;

**2. Aman Ma'ruf Nahi Munkar.** PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan melaksanakan perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang tercela (*munkar*). Prinsip ini sebagai landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, memperjuangkan dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial. PPP berusaha untuk mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat keseluruhan untuk mencegah *political decay* (pembusukan politik) yang mengakibatkan kemungkaran yang lebih dalam di tingkat nasional secara keseluruhan. Prinsip ini juga menumbuhkan keberanian dalam menegakkan

**3. Amanah, Kejujuran dan Keadilan:** Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pemertahanan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan partai mengarah pada perlawanan terhadap segala bentuk kebatilan karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebatilan. Meskipun begitu kebenaran adalah *Subhanahu Wata'ala* yang Maha Benar. Karena itu sepanjang kebenaran itu masih ada, kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun. Sementara itu, Prinsip kejujuran atau *amanah* merupakan prasyarat esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini perjuangan dalam bentuk politik harus bertekad tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian dan ketenteraman. Prinsip amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga sehingga terhindar dari



DR. H. SURYADHARMA ALL. M. SI.  
Ketua Umum DPP PPP



Ir. H.M. ROMAHRUMUZYI, MT  
Sekjen DPP PPP

perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat. PPP juga akan terus mempertahankan prinsip keadilan di dalam setiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (*justice*) adalah esensial dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik sehingga menimbulkan keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, ketenteraman dan sekaligus akan menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan, dan konflik;

4. **Prinsip Musyawarah:** PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Disamping itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. Apabila dengan musyawarah tidak dicapai mufakat maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan ditempuh dengan suara terbanyak dengan mencegah munculnya diktator mayoritas.

5. **Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan:** PPP mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah *Subhanahu Wata'ala*. Ini adalah keyakinan yang mendasar, yang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran partai sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan secara proporsional sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan, dan dikucilkan. Di samping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan;

6. **Prinsip Istiqamah:** PPP menjadikan prinsip *istiqamah* atau konsisten sebagai prinsip perjuangan. Artinya, PPP sebagai institusi dan kader-kadernya harus gigih, kokoh, terguh pendirian dan selalu konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Atas dasar *istiqamah* sebagai nilai-nilai dasar perjuangan partai, maka keberhasilan akan dapat ditegakkan dan kemantapan dalam perjuangan partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional;

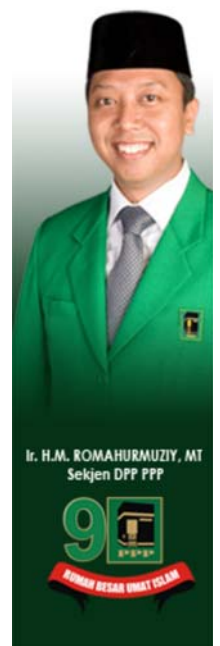
### III. PROGRAM PERJUANGAN PPP

#### A. ANALISA LINGKUNGAN

Secara umum, bangsa Indonesia masih belum mampu keluar dari krisis multidimensi yang dihadapinya. Proses reformasi memang telah mengantarkan Indonesia pada perubahan-perubahan signifikan menuju Indonesia yang maju dan demokratis. UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah mengalami proses amandemen selama empat kali dan menghasilkan perubahan-perubahan yang mendasar. Pembatasan masa jabatan presiden dan pemilihan presiden secara langsung, pencantuman pasal-pasal mengenai hak asasi manusia, *checks and balances* antar lembaga kekuasaan negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, otonomi daerah, penghapusan fungsi politik partai, desentralisasi kepolisian, upaya penguatan kedaulatan rakyat melalui pemilihan secara langsung, dan lain-lain adalah contoh dari perubahan-perubahan di bidang sistem politik dan ketatanegaraan.

Salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah walaupun makro-ekonomi mengalami perkembangan akan tetapi sektor riil masih belum berkembang yang berarti. Iklim investasi masih belum kondusif, kebutuhan terhadap lapangan kerja masih belum terpenuhi, jumlah pengangguran terus bertambah, kemiskinan masih memprihatinkan, serta daya beli masyarakat masih belum meningkat. Selain itu, kemampuan daya saing ekonomi Indonesia di dunia internasional masih belum optimal. Di lain pihak kecenderungan perekonomian global telah mengarah pada globalisasi yang semakin maju, ditandai dengan pembentukan pasar regional, disertai dengan kebangkitan raksasa ekonomi baru di Asia, Cina, Korea, dan India. Situasi ekonomi seperti ini membutuhkan kecerdasan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada posisi yang menguntungkan dengan memaksimalkan potensi sumber daya dan kemampuan bangsa Indonesia dalam percaturan perekonomian internasional. Oleh karena itu, perjuangan dan agenda politik PPP adalah bagaimana mampu mengartikulasikan kepentingan Indonesia ditengah kebangkitan ekonomi regional dan dunia yang semakin maju, memperjuangkan dan mengkomunikasikannya dengan masyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah walaupun makro-ekonomi mengalami perkembangan akan tetapi sektor riil masih belum berkembang yang berarti. Iklim investasi masih belum kondusif, kebutuhan terhadap lapangan kerja masih belum terpenuhi, jumlah pengangguran terus bertambah, kemiskinan masih memprihatinkan, serta daya beli masyarakat masih belum meningkat. Selain itu, kemampuan daya saing ekonomi Indonesia di dunia internasional masih belum optimal. Di lain pihak kecenderungan perekonomian global telah mengarah pada globalisasi yang semakin maju, ditandai dengan pembentukan pasar regional, disertai dengan kebangkitan raksasa ekonomi baru di Asia, Cina, Korea, dan India. Situasi ekonomi seperti ini membutuhkan kecerdasan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada posisi yang menguntungkan dengan memaksimalkan potensi sumber daya dan kemampuan bangsa Indonesia dalam percaturan perekonomian internasional. Oleh karena itu, perjuangan dan agenda politik PPP adalah bagaimana mampu mengartikulasikan kepentingan Indonesia ditengah kebangkitan ekonomi regional dan dunia yang semakin maju, memperjuangkan dan mengkomunikasikannya dengan masyarakat.





bangsa, yakni Pancasila yang menekankan pada semangat gotong royong (*ta'awun*), saling mendukung (*takaful*), menjunjung kebersamaan melalui koperasi, kongsi, atau korporasi (*syarikah*), menjunjung tinggi keadilan (*al-'adalah*), serta bebas dari kezaliman (*ad-dzulmu*), wan prestasi, dan kebohongan (*al-kadzbu*).

Nilai-nilai luhur bangsa perlu diaplikasikan pada pengembangan sistem ekonomi dengan mengarusutamakan sistem perekonomian yang berkeadilan sosial. Sistem tersebut adalah sistem yang telah berakar kuat pada kehidupan nyata di masyarakat seperti sistem ekonomi bagi hasil/bagi risiko, ekonomi syariah, koperasi, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan menghilangkan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat yang berbasis pada kegiatan spekulasi, rente, riba dan sebagainya.

Prinsip-prinsip ekonomi yang telah berakar kuat pada kehidupan nyata di masyarakat tersebut menekankan pada terwujudnya kesejahteraan dan keadilan, melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan etika, moral dan etos kerja yang tinggi.

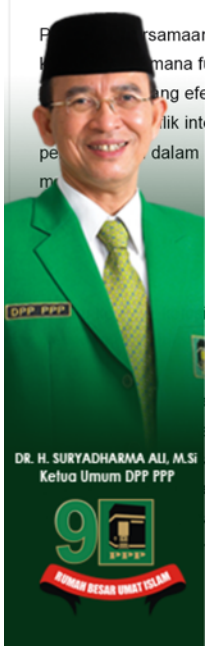
Dalam pengembangan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ekonomi harus bertumpu pada kekuatan sumberdaya nasional dengan menghilangkan ketergantungan pada kekuatan asing. Pada saat yang sama, Indonesia perlu membangun kekuatan ekonomi berdasarkan potensi nasional seperti sumberdaya alam, sumber-daya manusia, maupun sumber dana domestik yang secara optimal dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pada saat ini, Indonesia sebagai negara dengan potensi energi yang besar tengah menghadapi krisis energi karena pengelolaan energi dan penggalian sumber-sumber energi alternatif yang tidak optimal. Sebagaimana dimaklumi, kebutuhan energi merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan, karena energi menjadi penentu bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu kesenjangan energi nasional hendaknya menjadi perhatian penting, dengan mengintensifkan penggalian sumber energi alternatif khususnya energi terbarukan (*renewable energy*) dan bio-energi yang berasal dari non-pangan sebagai prioritas utama pemenuhan energi serta penggunaan energi nuklir sebagai pilihan akhir.

Di bidang politik, sistem politik multi partai memungkinkan lahirnya partai-partai baru dengan berbagai latar belakang kelompok sosial dan ideologi. Begitu juga dengan lahirnya partai-partai berasas Islam atau yang berbasis pendukung masyarakat Islam. Hal ini berakibat pada terjadinya polarisasi ideologi politik kepartaian yang selama pemerintahan Orde Baru ditabukan. Namun demikian, polarisasi ideologi yang terjadi selama ini masih bersifat simbolik dan belum mencerminkan kristalisasi dari nilai dan paradigma kebijakan partai secara substansial.

Pada saat ini, kebersamaan, sangat terasa masih lemahnya proses konsolidasi dan penguatan institusi politik yang mana fungsi-fungsi partai politik belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga berakibat pada tidak efektifnya peran kenegaraan dan kemasyarakatan. Partai-partai politik juga masih rentan terhadap konflik internal yang berkepanjangan, demikian halnya dengan kurang maksimalnya lembaga-lembaga politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akibatnya kepercayaan masyarakat kepada mereka terus melemah.

Reformasi, HAM, reformasi masih mengalami hambatan yang disebabkan antara lain oleh budaya dan politik yang berakar kuat pada nepotisme. Proses penegakan hukum masih memperlihatkan belum memadainya sistem hukum, terlebih lagi adanya kelemahan moral dan mental para aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum, terkesan proses penegakan hukum tebang pilih, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bernegara yang bersih dan sehat. Kasus pencemaran lingkungan dan rusaknya hutan dan penambangan sumber daya alam lainnya secara serampangan terus berlanjut. Proses penegakan hukum yang tegas dan terpadu. Begitu juga, kebutuhan dan jaminan rasa aman belum terpenuhi dengan merebaknya konflik sosial yang berkepanjangan, perilaku kekerasan terjadi di mana-mana, termasuk kekerasan struktural yang tidak jarang melibatkan aparat negara.



Dalam kehidupan sosial-budaya, muncul gejala alienasi atau keterasingan di tengah hiruk pikuk berkembangnya dunia industri dan teknologi informasi. Dampak dari proses globalisasi dan teknologi informasi dikuatirkan akan terus mengikis budaya dan norma-norma sosial masyarakat, sehingga akan mengancam identitas diri dan budaya nasional Indonesia sebagai sebuah bangsa. Hal ini menjadi tantangan bagi PPP sebagai partai Islam untuk berperan aktif membentengi kebudayaan bangsa dan nilai-nilai agama yang mulai terkikis oleh masuknya budaya luar dan perilaku sosial masyarakat yang hedonistik, dengan berjuang melalui proses pembuatan kebijakan-kebijakan di bidang politik kebudayaan, ekonomi dan politik luar negeri.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indonesia memang tidak bisa menutup diri dari kemajuan dan perubahan-perubahan yang terjadi secara global. Oleh karenanya, perkembangan dan perubahan yang terjadi di dunia internasional bisa berdampak positif sekaligus juga berdampak negatif terhadap bangsa Indonesia. Invasi militer Amerika Serikat di negara-negara Islam, perubahan politik yang drastis di Timur Tengah dan Afrika yang juga merupakan negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas muslim, serta berlarut-larutnya penyelesaian dari penjajahan Israel atas Palestina menjadi tantangan tersendiri bagi perjuangan PPP sebagai partai Islam. Demikian juga isu terorisme global yang dikampanyekan oleh Amerika dengan cara menyudutkan negara-negara Islam, termasuk Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan juga isu nuklir Iran yang menyebabkan memanasnya stabilitas kawasan Timur Tengah dan dunia.

Memang harus diakui bahwa dalam Islam, termasuk Islam di Indonesia, terdapat berbagai madzhab dan kelompok dengan pemikiran dan pola gerakan sosial-politik yang berbeda, mulai dari yang konservatif, radikal dan liberal. Wacana dan paradigma hubungan Islam dan negara ikut memengaruhi sikap dan gerakan politik kelompok-kelompok Islam tersebut, yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Dalam paradigma integralistik, agama dan negara menyatu (integrated). Paradigma ini mensubordinasikan kepentingan negara kepada agenda universal Islam semata. Adapun paradigma sekularistik memisahkan agama atas negara dan memisahkan negara atas agama secara berhadapan-hadapan (diametral). Sementara itu, PPP berpandangan bahwa hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan. Sebab dalam sejarahnya, umat Islam Indonesia sesungguhnya termasuk yang berkarakter *umatun wasathan*, moderat, dan mampu beradaptasi dengan kondisi dan budaya lokal.

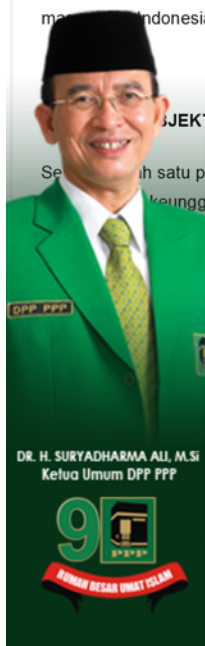
Sementara itu, karakteristik masyarakat Indonesia sebagai pemilih mulai bergeser pada rasionalisme dan pragmatisme di mana faktor ideologi kurang atau belum menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik. Hal ini harus menjadi perhatian partai, khususnya PPP, dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat pemilih melalui program-program nyata yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat. Partai Islam seperti PPP hendaknya menggabungkan unsur ideologi dan pendekatan rasional kepada masyarakat. Dilihat dari kekuatan sosio-historis, PPP punya peluang besar karena partai-partai Islam yang baru lahir yang berbasis massa empat unsur ormas yang berfusi ke PPP tidak sepenuhnya mendapat kepercayaan dari masyarakat, terlebih dengan konflik internal yang berkepanjangan. Dengan demikian, PPP sebagai partai Islam yang moderat dan sudah lama berjuang bersama masyarakat bisa menjadi alternatif dan tumpuan harapan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam santri.

#### OBJEKTIF PARTAI

Sebagai salah satu partai yang memiliki sejarah paling panjang dibandingkan partai-partai politik Islam yang lain, keunggulan modal dasar perjuangan, yaitu latar belakang historis sebagai fusi politik penerus partai Islam. Fusi ini tidak hanya menjadi dokumen historis, tapi juga merupakan kekuatan aktual untuk menyatukan sikap perjuangan politik umat.

Untuk itu, PPP sudah berusaha melakukan pembenahan diri dengan merumuskan paradigma baru dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP Tahun 2000. Paradigma baru tersebut setidaknya dari aspek strategis, yakni: kembali ke jati dirinya semula sebagai partai yang berasas Islam, sebagai partai Islam yang berpijak pada prinsip *umatun wasathan* (menghindari sikap ekstrem kanan dan kiri), dan konsolidasi partai yang mengedepankan prinsip kebersamaan, persatuan dan persatuan untuk menghindari konflik dan perpecahan partai yang berkepanjangan.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah telah terbentuknya jaringan organisasi partai di seluruh Indonesia, yang ditopang oleh kader-kader yang tumbuh serta berakar dari bawah yang dipilih secara demokratis dalam forum Musyawarah Kerja Nasional. Hal ini menunjukkan keteguhan sikap politik partai sebagai cermin kemandirian dalam memperjuangkan dan memperjuangkan umat.



DR. H. SURYADHARMA ALL. M.Si  
Ketua Umum DPP PPP



Ir. H.M. ROMAHURMUZYI, MT  
Sekjen DPP PPP

Begitu juga, proses reformasi memberikan kesempatan kepada kader-kader partai untuk duduk dalam pemerintahan, meskipun belum maksimal seperti yang diharapkan terutama karena perolehan suara PPP selalu menurun. Dalam Pemilihan Umum 2009, PPP mengalami penurunan suara 3 persen menjadi 5,33 persen dengan perolehan 38 kursi DPR. Padahal dalam Pemilihan Umum 2004, PPP memperoleh suara 8,15 persen dengan perolehan 58 kursi DPR. Posisi PPP turun ke peringkat 6, dibawah Partai Demokrat (20,81 persen), Golkar (14,45 persen), PDIP (14,01 persen), PKS (7,89 persen), dan PAN (6,03 persen). Perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka, lemahnya profesionalisme penyelenggara pemilu, dan perilaku pemilih yang cenderung pragmatis di satu sisi dan belum terpadunya implementasi strategi dan kebijakan disertai lemahnya fungsionalisasi struktur partai ditengarai menjadi faktor-faktor yang menyebabkan turunnya perolehan suara PPP pada pemilu legislatif 2009.

Sebagai partai Islam yang berorientasi keindonesiaan dan keumatan, PPP sesungguhnya masih memiliki daya tarik dengan kemungkinan masuknya beberapa kalangan di luar empat unsur fusi, yaitu partai-partai yang berasaskan Islam atau yang berbasis umat Islam yang tidak memenuhi *Parliamentary Threshold*. Begitu juga, Sejumlah organisasi sayap partai dari kalangan ulama, pemuda, mahasiswa, dan kaum perempuan melalui Generasi Muda Pembangunan Indonesia, Angkatan Muda Ka'bah, Gerakan Pemuda Ka'bah, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Wanita Persatuan Pembangunan juga aktif mendinamisir Partai. Ini jelas merupakan modal yang penting untuk memenangkan Pemilihan Umum yang akan datang.

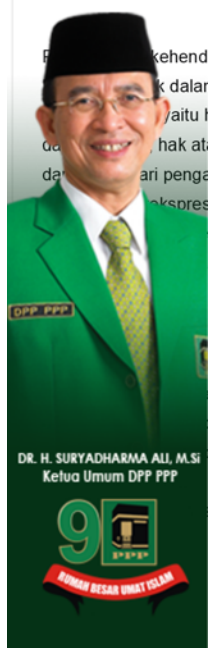
Namun demikian, PPP masih menghadapi berbagai permasalahan, yaitu untuk mencapai "fusi tuntas" masih diperlukan waktu dan kerja keras seluruh jajaran partai dengan mengedepankan semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan langkah untuk mencapai cita-cita.

Walaupun struktur dan infrastruktur partai sudah mengakar hingga ke lapisan bawah, akan tetapi sangat dirasakan kurang maksimal dan kurang efektifnya gerak partai dalam melaksanakan fungsi dan peran kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat DPP, DPW, DPC, PAC maupun ranting. Hal ini menyebabkan citra PPP yang semakin merosot dan terhambatnya konsolidasi dalam mengembangkan jaringan dan basis konstituen.

Selain itu, meskipun telah dilaksanakan upaya pengembangan sumber daya manusia berupa kader yang tangguh dan berkualitas, namun mengingat besarnya jumlah kader yang dibutuhkan maka kegiatan kaderisasi masih sangat lemah sehingga terus perlu dipacu lagi. Begitu juga mengenai soal sumberdaya dan dana, meskipun bukan menjadi penyebab utama, namun ketersediaan sumberdaya dan dana perjuangan Partai masih menjadi masalah. Untuk itu perlu dicari berbagai terobosan dalam memecahkannya, dengan cara yang halal dan tidak melanggar hukum. Begitu juga soal kemandirian di setiap tingkatan organisasi dan citra Partai yang harus secara terus menerus diupayakan agar dukungan masyarakat semakin besar.

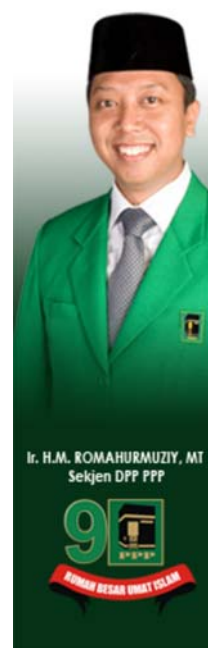
Di samping itu, selama ini PPP sangat lemah dalam membangun citra dan komunikasi politik, yang salah satunya disebabkan antara lain oleh kurang maksimalnya peran-peran kenegaraan strategis yang seharusnya dimainkan PPP, kurang tegasnya sikap dan kebijakan partai dalam melihat persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, serta kurang maksimalnya pembangunan jaringan dan komunikasi dengan dunia pers.

### C. PROGRAM PERJUANGAN

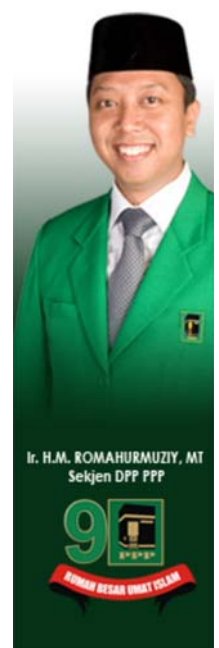


Partai Persatuan Pembangunan berkeinginan kuat untuk selalu mendorong percepatan transformasi menyeluruh di semua aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam dimensi sistem maupun mentalitas dan kultur serta memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar manusia, yaitu hak sebagai manusia merdeka, hak atas keyakinan beragama dan tidak adanya pemaksaan dalam beragama, hak atas penghidupan, pekerjaan, nafkah pangan, sandang dan papan, hak atas keselamatan jiwa dan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas penganiayaan, perusakan dan penodaan, hak mendayagunakan akal-fikiran serta kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, hak atas kepemilikan harta benda yang sah, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk menjaga kelangsungan generasi, serta suasana yang kondusif bagi pengembangan jati-diri dan pembangunan bangsa Indonesia.

Program yang hendak dibangun oleh PPP adalah umat dan masyarakat terbaik (*khairu ummah*) yang dapat menjalin hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum min al-lah*), keharmonisan hubungan manusia dengan sesama manusia dan keselarasan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan sekitarnya (*hablum min al-alam*). Untuk itu, PPP akan patkan ikhtiar *mabadi khairu ummah* sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya membangun peradaban Indonesia dalam rangka membangun peradaban yang unggul sebagai bangsa Indonesia yang berkeadilan sosial transformatif merahmati semesta alam (*rahmatan lil alamin*).



1. PPP meyakini Islam sebagai agama paripurna yang mengemban misi transformatif di semua aspek kehidupan dalam rangka merahmati semesta alam. PPP menempatkan agama sebagai sumber kekuatan rohani dan sekaligus sumber kesadaran akan makna, hakikat, dan tujuan hidup manusia. Agama merupakan sumber moral, etika, inspirasi, dan motivasi sebagai pedoman untuk membedakan yang benar dan salah. Agama adalah pendorong manusia untuk keluar dari kegelapan dan meraih cahaya kebenaran.
2. PPP berpandangan bahwa hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan demi terwujudnya negara Indonesia yang damai, makmur, sejahtera, religius dan bermoral. Dengan demikian, PPP menentang hubungan yang bersifat integralistik yang mensubordinasikan kepentingan negara Indonesia kepada agenda universal Islam semata, juga menolak pola hubungan yang sekularistik yang menjauhkan peran agama dalam kehidupan kenegaraan.
3. PPP menjadikan Islam Indonesia sebagai sendi-sendi ajaran dan basis paradigmatis bagi cita-cita, model strategis dan kode etik partai dalam ber-*amar ma'ruf nahy munkar*, melalui upaya:
  - (a) mengejawantahkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan secara terpadu, seimbang, selaras, serasi, harmonis, otentik dan utuh menyeluruh;
  - (b) berikhiar agar nilai-nilai itu tertanam, hidup dan mengakar di masyarakat, menjiwai perikehidupan bangsa serta tumbuh berkembang di atas kesadaran kemanusiaan dan keinsafan akan rahmat dan *mashlahah* yang terkandung di dalamnya;
  - (c) mendorong penyelenggaraan perikehidupan politik yang sehat dan santun (*akhlâq al-karîmah*) serta dijiwai semangat *tasâmuh*, *tawâsuth*, *tawâzun*, *ta'awwun* dan *i'tidâl*.
4. PPP senantiasa akan mengarahkan perjuangan (*jihad*) *li-'i'la-i kalimatillah* dalam rangka membentuk umat terbaik (*mabadi khairu ummah*) dan terwujudnya *baladun thoyyibatun warobbun ghofur* yang hakiki sebagai implementasi *rahmatan lil alamin*. Syari'at yang diperjuangkan oleh PPP adalah syari'at yang hakiki bukan sekedar simbol, apalagi kebanggaan simbolis, dengan cara:
  - (a) menempatkan seluruh gerakannya dalam kerangka *mujâhadah*, baik secara lahiriah, maupun batiniah. Komitmen tersebut secara *inherent* di dalam cita-cita, pilihan strategis, program, sikap dan kerja partai.
  - (b) menempatkan ulama sesuai peran dan fungsinya secara maksimal sebagai penerus misi kenabian (*risalah nabawiyah*) dan panutan yang membimbing umat kearah penyempurnaan akhlak, termasuk etika berpolitik, ke jalan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki duniawi ukhrawi.
5. Dengan prinsip "*lakum diinukum waliyadain..*" dan disemangati oleh "kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan-nya itu" seperti dimaksud oleh pasal 29 UUD 1945, maka PPP selalu berjuang untuk:
  - (a) mendorong pengembangan kualitas kehidupan beragama serta hubungan internal dan antar umat beragama yang harmonis dengan dilandasi nilai-nilai akhlak mulia:
  - (b) mendorong apresiasi kepentingan umat beragama dengan akses yang adil dan proporsional, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta penataan dan pengelolaan fasilitas ibadah, termasuk fasilitas hari besar keagamaan;
  - (c) mendorong pengembangan kesadaran moral dan etika, pemantapan nilai-nilai kehidupan keluarga, literasi publik, pembelajaran terbuka dan dialogis, sosialisasi pentingnya kualitas kehidupan keluarga.
6. PPP berkomitmen dan bertekad meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, memperkuat penguatan kelembagaan, mekanisme dan praktik politik yang demokratis melalui upaya:
  - (a) meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan bela negara,
  - (b) demokrasi tentang kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, dan berorganisasi, pers yang bertanggung-jawab;
  - (c) kualitas dan kecepatan pelayanan publik termasuk peningkatan wawasan, ketrampilan dan keadilan negara dan pelayanan publik, serta reformulasi otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan yang memuaskan.
  - (d) pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan akses yang sama dan pemberdayaan ekonomi dan produksi bagi rakyat, menjamin pengakuan dan penghargaan



terhadap demokrasi, kebangsaan dan keadilan sosial, persamaan dan perlindungan hak politik warga negara, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam menempati jabatan-jabatan publik di seluruh wilayah RI.

(e) Mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sebagai pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin.

2. PPP memaknai kekuasaan sebagai amanah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai implementasi *rahmatan lil alamin*, yang dilakukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dilandasi nilai-nilai akhlak mulia, serta dipertanggungjawabkan kepada pihak pemberi amanah. PPP memaknai dan sekaligus mendorong pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia sebagai bagian dari pewujudan *baladun thoyyibatun warobbun ghofur* serta meniatkan ikhtiar berpolitik sebagai bagian dari ibadah.

3. PPP mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang *maslahatir-roiyah*, yakni mampu menjamin pewujudan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, memberikan rasa aman dan tenteram, melindungi dan mengayomi rakyat, menjaga persatuan nasional, keutuhan wilayah dan kelangsungan negara, menegakkan hukum, nilai-nilai kemerdekaan dan kedaulatan rakyat yang hakiki, serta melangsungkan perikehidupan politik yang cerdas, sehat, santun, adil, beradab dan demokratis yang memungkinkan seluruh warga negara mengontrol jalannya pemerintahan.

4. PPP memahami keberadaan negara sebagai salah satu pilar yang menjamin terlaksananya kehidupan beragama yang sebaik-baiknya serta kemerdekaan dan NKRI sebagai hasil perjuangan sekaligus kesepakatan yang sah dan mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Dengan komitmen tersebut, maka ikhtiar *'izzul islâm wal muslimin* dan *mabadi khairu ummah* oleh PPP selalu terintegrasi dengan perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta memelihara persatuan, keutuhan bangsa dan kelangsungan NKRI.

5. PPP memahami kemajemukan (*al-ikhtilaf*) sebagai hukum alam (*sunnatullah*) sekaligus keniscayaan sejarah yang diakui keberadaannya sejak zaman Raulullah SAW, serta menyadari bahwa sesama manusia berkedudukan sederajat, tiada kelebihan antara yang satu dan lainnya, apakah asal-usul suku, ras, keturunan, jenis kelamin, golongan, profesi dan sebagainya, kecuali karena ketakwaannya terhadap Allah SWT. Dalam kemajemukan terkandung potensi untuk saling mengenal, menghormati, bekerja-sama, tolong-menolong, nasehat-menasehati, bertolmba dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran guna meningkatkan amal ibadah serta ikhtiar meraih kedamaian, kemaslahatan dan kerahmatan. Dengan memaknai Indonesia sebagai kawasan damai, lahan amal dan arena dakwah; PPP selalu mengakui kemajemukan, menjunjung tinggi persatuan dan mengembangkan persaudaraan; yang diantaranya termanifestasi dalam ikatan keagamaan (*ukhuwwah islamiyyah*), kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*), dan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyah*).

6. PPP bertekad dan berjuang untuk menjadikan dirinya sebagai pioner dan pemersatu gerakan politik Islam sebagai alat perjuangan (*jihad*) nilai-nilai dan aspirasi umat Islam Indonesia dalam kehidupan kenegaraan, agar bangsa Indonesia berjalan sesuai dengan panduan ajaran Islam.

7. PPP mendorong penguatan sistem pertahanan nasional dengan:

(a) menegakkan kesatuan dan keutuhan wilayah negara, melalui kerjasama internasional dan penegasan batas wilayah nasional;

(b) meningkatkan profesionalisme aparat pertahanan baik TNI maupun badan intelijen berikut kelayakan dan tingkat kesejahteraan anggotanya;

(c) meningkatkan efektifitas pelaksanaan subsidi langsung dan jaminan sosial kepada penduduk miskin serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, layanan pendidikan, dan kesehatan serta perumahan kepada penduduk miskin.

Maintain nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam perikehidupan ekonomi dengan tolong-menolong sesama manusia sebagai pelaku (*economic man*) sekaligus makhluk sosial dan religius yang berakhlak mulia serta mampu menundukkan nafsu jahat dan praktik tercela. Harta kekayaan tidak boleh beredar hanya di antara segelintir orang saja. PPP menghormati kompetisi yang sehat yang berkeadilan, percaya, kejujuran, dan keadilan sekaligus menolak segala bentuk persaingan yang tidak sehat. Kemenangan individual termasuk keserakahan (*libidonomic devian*) yang bertentangan dengan ajaran agama.

Perhatikan bahwa perekonomian nasional dalam era globalisasi memiliki dinamika yang kompleks, yang menarik berbagai kepentingan aktor dan ideologi berikut dampaknya, sehingga memerlukan pendekatan antar bidang, bukan saja bidang ekonomi tetapi juga sosial,



politik dan budaya. Karena demokrasi memiliki dimensi yang luas, bukan saja dalam bidang pemerintahan tetapi juga bidang ekonomi, maka pembangunan ekonomi harus dibarengi pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat diantaranya melalui penegakan asas demokrasi ekonomi dan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.

3. PPP harus mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan solidaritas, kepedulian dan keadilan dalam masyarakat membentuk sebuah lembaga atau badan yang mengelola potensi zakat demi kepentingan umat. PPP sebagai partai Islam harus memanfaatkan dan memperkuat potensi zakat yang ada tidak hanya dikalangan warga PPP, tetapi umat Islam secara keseluruhan. Zakat tidak sekadar menjangkau hubungan teologis dengan Tuhan semata, tetapi juga merefleksikan solidaritas menuju terciptanya keadilan sosial. Keadilan ekonomi dalam bentuk kewajiban zakat adalah wujud keadilan sosial yang paling konkrit yang mempunyai obyek dan tujuan yang luas, yaitu mengurangi dampak berbagai masalah sosial yang timbul dalam masyarakat.

4. PPP harus mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekonomi dengan mengembangkan dan memperkuat sendiri-sendiri ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat, yakni sistem ekonomi bagi hasil, ekonomi syariah, koperasi dan UKM dan menghilangkan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat yang berbasis pada k

